

INDIKATOR EKONOMI

Kabupaten Pulau Morotai



INDIKATOR EKONOMI

Kabupaten Pulau Morotai



2018



Indikator Ekonomi
Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2018

No. katalog BPS : 9201001.8207
Ukuran Buku : 14.28 cm × 21 cm
Jumlah Halaman : vii + 35 halaman
Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai
Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai

KATA PENGANTAR

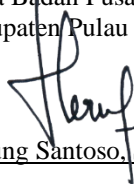
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendaknya Publikasi tahunan “Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penerbitan Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data di Kabupaten Pulau Morotai terutama yang terkait dengan bidang ekonomi.

Publikasi ini berisi data dari beberapa indikator ekonomi. Penyajian publikasi ini berbentuk penjelasan yang disertai dengan table dan ulasan sederhana mengenai perkembangan indikator ekonomi Pulau Morotai selama tahun 2018.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dalam mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini. Selain itu, publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi serupa di masa yang akan datang.

Morotai, September 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pulau Morotai



Heru Agung Santoso, S.ST, M.Stat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I Produk Domestik Regional Bruto	1
BAB II Pertanian sebagai Sektor Utama Perekonomian	10
BAB III Keuangan Daerah.....	15
BAB IV Transportasi Laut dan Udara.....	21
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah).....	2
Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018	8
Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.....	18
Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.....	19
Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018	20
Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018	21
Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.....	22
Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 atas dasar harga berlaku	4
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018.....	5
Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan <i>share</i> PDRB terbesar tahun 2014-2018.....	6

BAB I

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, memerlukan berbagai macam data statistik sebagai bahan acuan dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Hasil-hasil dari seluruh strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi. Data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan yang ada pada masa yang lalu, masa kini dan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat yang disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional atau Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional dan regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan

ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta.

Indikator ekonomi yang akan diuraikan dalam tinjauan perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha meliputi nilai nominal PDRB, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita dan Indeks Harga Implisit.

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2014	967.070,27	773.862,41
2015	1.080.578,75	821.322,16
2016	1.201.896,71	872.948,13
2017*	1.319.055,82	928.423,42
2018**	1.438.560,87	989.197,35

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

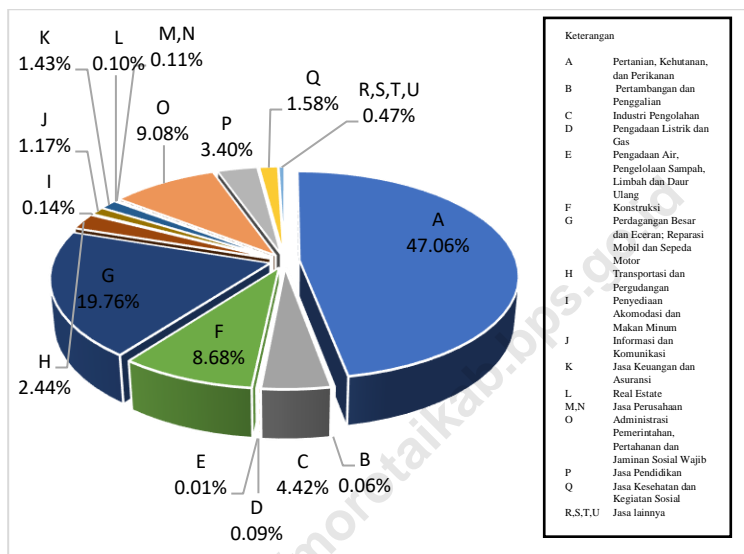
PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga berlaku dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran nilai tambah yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan penyajian atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk melihat secara riil besaran nilai tambah yang dihasilkan setelah pengaruh harga dihilangkan.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dari nilai tambah yang diciptakan, perekonomian Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp. 1.319,05 miliar. Nilai PDRB ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2016 yang mencapai Rp. 1.201,89 miliar. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mencapai Rp. 928,42 miliar. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 872,94 miliar.

Sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tajam, dimana nilai PDRB atas harga berlaku mencapai Rp. 1.438,56 miliar sementara nilai PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 989,19 miliar.

Secara umum, struktur ekonomi menggambarkan besarnya peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB di suatu daerah. Disamping itu, struktur ekonomi juga dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar merupakan kategori andalan bagi suatu daerah.

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 atas dasar harga berlaku



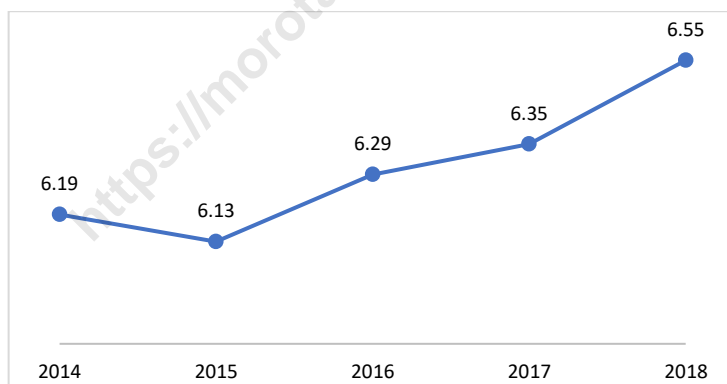
Struktur PDRB Kabupaten Pulau Morotai menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,06 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,76 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,08 persen.

Secara umum peranan masing-masing kategori lapangan usaha selama periode tiga tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti dan cenderung masih berada dikisaran angka yang sama. Secara lebih rinci, besarnya andil masing-masing kategori yang menjadi motor

penggerak perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berada pada struktur perekonomian Kabupaten Pulau Morotai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memberi gambaran tentang tingkat ekonomi yang terjadi, dimana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018

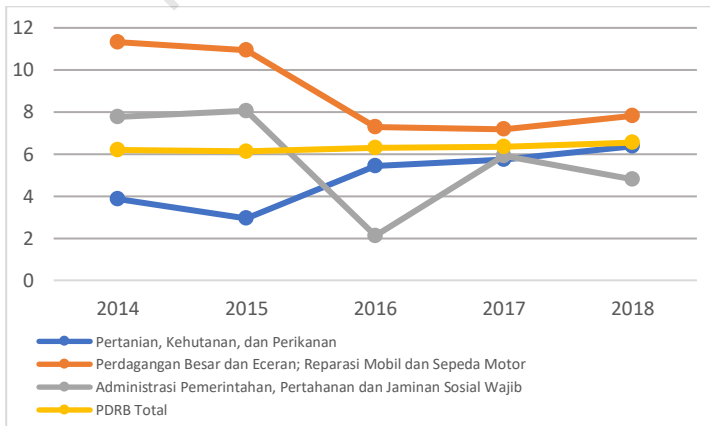


Pertumbuhan ekonomi kabupaten Pulau Morotai tahun 2018 adalah sebesar 6,55, meningkat sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Konstruksi yang tumbuh sebesar 10,16 persen

dan diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,81 persen.

Besarnya andil suatu kategori terhadap nilai total PDRB suatu daerah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain, pergerakan kategori lapangan usaha yang memiliki andil besar memiliki pengaruh yang besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dominasi tiga lapangan usaha tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kabupaten Pulau Morotai. Laju pertumbuhan pada tahun 2018 untuk kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sebesar 6,37 persen, Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 7,81 persen, dan untuk Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib mengalami perlambatan sebesar 1,1 persen menjadi 4,80 persen.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan *share* PDRB terbesar tahun 2014-2018



Jika melihat pertumbuhan pada masing-masing kategori di tahun 2018, ada 6 kategori yang pertumbuhannya berada diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai (didas 6,55 persen), yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, kategori Jasa lainnya, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan kategori Konstruksi.

Sedangkan 11 kategori lainnya berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai diantaranya yaitu kategori Industri Pengolahan, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, kategori Jasa Pendidikan, kategori Jasa Perusahaan, kategori Real Estate, kategori Informasi dan Komunikasi, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan paling kecil terdapat pada kategori Industri Pengolahan yang hanya mencapai 1,86 persen.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan per kapita ini dapat didekati dengan PDRB per kapita. Namun demikian, PDRB per kapita ini tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat.

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Dengan demikian, PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB

besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapita akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan jumlah penduduknya banyak maka PDRB per kapita akan menjadi kecil nilainya.

Angka PDRB per kapita dinilai dengan dua cara, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB dapat menggambarkan NTB per kapita yang masih dipengaruhi harga komoditi yang dihasilkan. PDRB per kapita ADHK adalah pertumbuhan nyata ekonomi per kapita, umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan PDRB per kapita akan tetapi hal ini belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi.

Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB Per Kapita	
	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)
2014	14.864.591,69	12.659.112,79
2015	16.362.733,45	13.093.675,62
2016	17.794.041,38	13.524.826,85
2017*	19.257.462,02	13.986.863,60
2018**	20.609.925,29	14.508.545,53

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita penduduk kabupaten Pulau Morotai atas dasar harga berlaku meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014 sebesar 14,86 juta rupiah, tahun 2015 meningkat menjadi 16,36 juta rupiah, tahun 2016 sebesar 17,79 juta rupiah, tahun 2017 sebesar 19,25 juta rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 20,60 juta rupiah. Akan tetapi kenaikan PDRB perkapita tersebut tidak riil, karena angka tersebut masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. PDRB perkapita yang riil tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dimana pendapatan sebesar 12,65 juta rupiah, tahun 2015 meningkat menjadi 13,09 juta rupiah, tahun 2016 sebesar 13,52 juta rupiah, tahun 2017 sebesar 13,98 juta rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 14,50 juta rupiah

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR UTAMA PEREKONOMIAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian daerah dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDRB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan.

Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.

Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau

sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Sektor pertanian memiliki sumbangan terhadap nilai PDRB kabupaten Pulau Morotai hampir 50 persen. Walaupun andilnya cenderung menurun untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB kabupaten Pulau Morotai sebesar 47,06 persen. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang memiliki kontribusi sebesar 47,26 persen. dalam 5 tahun terakhir ini, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, padahal kondisi pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 48,84 persen.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan

akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (*intensive farming*). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai *intensifikasi*. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi yang berseberangan dengan pertanian industrial adalah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial.

Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub “ideologi” pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya

dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC's berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

a. Kontribusi Produk

Penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman

b. Kontribusi Pasar

Pembentukan pasar domestik untuk barang industri & konsumsi

c. Kontribusi Faktor Produksi

Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal & TK dari sector pertanian ke Sektor lain

d. Kontribusi Devisa

Pertanian sbg sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Peran sektor pertanian di Indonesia dinilai belum memuaskan, pemerintah justru terkesan menyampingkan masalah sektor pertanian, padahal sebagai negara agraris sektor pertanian Indonesia harusnya menarik perhatian lebih pemerintah dari segi kualitas dan fasilitas yang memadai. Sektor pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Semakin majunya sektor pertanian di Indonesia, tentu saja dapat meningkatkan perekonomian negara.

Pada tahun 2018 penggunaan lahan tanaman padi sawah mencapai luas sebesar 1.272 hektar atau hanya sekitar 0,54 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pulau Morotai, sementara luas kategori perkebunan mencapai 48.560 hektar, atau sekitar 20,97 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Pulau Morotai tercatat luas area untuk kawasan hutan sebesar 161.680 Ha sekitar 69,84 persen dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III

KEUANGAN DAERAH

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi :

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode, yang biasanya satu tahun. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, dan belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan maupun pembangunan daerah. Penerimaan daerah Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, mendorong peningkatan besaran APBD yang diterima oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah, sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengelola anggaran tersebut secara tepat, karena dalam era desentralisasi fiskal ini, penerimaan daerah merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Penerimaan daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

(BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain yang sah. Perkembangan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai secara umum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan yang besar ini tidak lain adalah disebabkan meningkatnya sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan (DAU & DAK). Bila dilihat menurut komponen atau sumber penerimaan daerah, maka komponen terbesar dari penerimaan daerah adalah dana perimbangan yang berupa DAU, BHPBP, dan DAK yang memiliki kontribusi sekitar 84% dari penerimaan daerah. Sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sekitar 4,81%. Rendahnya proporsi penerimaan PAD dibandingkan dengan DAU mengindikasikan belum optimalnya pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menggali sumber-sumber penerimaan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain adalah:

1. Tingkat hidup dan ekonomi masyarakat masih rendah
2. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
PAD	31.710,47	4,81
Dana Perimbangan	554.480,28	84,08
Lainnya	73.231,65	11,11
Jumlah	640.506,96	100

Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004 komponen PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan secara umum pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	4.879,002	15,38
Retribusi	8.820,903	27,82
Bagi Hasil	-	-
Lain-lain PAD	18.010,570	56,80
Jumlah	31.710,476	100

Jumlah keseluruhan dana APBD baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan menjadi sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Besarnya total belanja tidak terlepas dari bagaimana kondisi belanja masing-masing daerah. Adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan dari masing-masing daerah, mengakibatkan prioritas pembangunan dari masing-masing daerah juga berbeda.

Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018
(1)	(2)
A Belanja Tidak Langsung	309.413,04
Belanja Pegawai	185.944,63
Belanja Subsidi	-
Belanja Bantuan Keuangan	106.369,97
Belanja Hibah	4.380,48
Belanja Bantuan Sosial	12.355,95
Belanja Tidak Terduga	362,00
B Belanja Langsung	337.874,62
Belanja Pegawai	25.263,70
Belanja Barang & Jasa	137.679,70
Belanja Modal	214.931,21
Jumlah / Total	687.287,67

BAB IV

TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

Terdapat dua pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yaitu Pelabuhan Imam Lastori di Desa Daruba dan Pelabuhan Ferry di Desa Juanga. Dari kedua pelabuhan tersebut kapal yang masuk ke Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2018 adalah sebanyak 855 unit, dimana seluruhnya adalah kapal untuk pelayaran dalam negeri dengan rata-rata kapal yang masuk sekitar 72 kapal setiap bulannya. Kunjungan kapal yang paling banyak terjadi pada bulan Oktober 2018 dengan jumlah sekitar 82 kapal.

Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	76
Februari	46
Maret	73
April	78
Mei	78
Juni	73
Juli	73
Agustus	76
September	68
Oktober	82
November	58
Desember	74

Pergerakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut di Pulau Morotai pada tahun 2018 cukup mengalami fluktuasi setiap bulannya. Jumlah penumpang yang turun pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebanyak 24.934 orang, sedangkan yang naik dari pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 18.787 orang. Dengan jumlah penumpang paling banyak menggunakan jasa angkutan laut ini pada bulan Juni 2018 yaitu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri.

Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Bulan	Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Turun	Naik	Turun	Naik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	2.745	1.316		
Februari	2.788	1.422	1,56	1,56
Maret	1.828	514	-34,43	-34,43
April	1.448	654	-20,78	-20,78
Mei	3.059	2.456	111,25	111,25
Juni	3.913	2.434	27,91	27,91
Juli	2.682	1.722	-31,45	-31,45
Agustus	2.774	1.898	3,43	3,43
September	2.270	1.652	-91,81	-91,81
Oktober	1.850	1.861	-18,50	-18,50
November	1.066	814	476,21	476,21
Desember	2.219	2.044	108,16	108,16

Selain untuk angkutan penumpang, jasa transportasi laut ini juga menjadi faktor penting dalam perekonomian kabupaten Pulau Morotai yaitu dalam pengangkutan barang. Jumlah barang yang dibongkar dan muat pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai meningkat tajam sejak adanya tol laut yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2017. Namun, pemanfaatan tol laut belum terlalu signifikan dampaknya terhadap perekonomian.

Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Bulan	Jumlah Bagasi (Ton)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	9.137	551	-74,29	-74,29
Februari	2.349	372	265,81	265,81
Maret	8.593	676	-51,91	-51,91
April	4.132	1.034	-33,37	-33,37
Mei	2.753	435	398,87	398,87
Juni	13.734	423	49,42	49,42
Juli	20.522	1.304	239,56	239,56
Agustus	69.686	854	7389,30	7389,30
September	5219	475	129,14	129,14
Oktober	11959	1540	-76,01	-76,01
November	2868	470	216,91	216,91
Desember	9089	398		

Selain transportasi laut, Kabupaten Pulau Morotai dapat diakses melalui jalur Transportasi Udara. Di Kabupaten Pulau Morotai terdapat satu bandara yaitu Bandara Pitu yang terletak di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan. Jasa angkutan udara untuk umum pada tahun 2017 baru dimulai bulan April. Pada tahun sebelumnya memang sudah ada penerbangan untuk Morotai-Ternate, namun dengan pesawat yang hanya bermuatan 10 penumpang. Namun sejak Desember 2016 pesawat tersebut berhenti terbang di Morotai.

<https://morotai.kab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	570.664,2	623.355,6	676.935,2
B	Pertambangan dan Penggalian	634,5	704,6	791,6
C	Industri Pengolahan	58.403,8	61.176,3	63.571,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	994,6	1.250,9	1.325,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	166,2	184,2	193,7
F	Konstruksi	95.827,2	108.612,7	124.932,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	233.560,8	258.796,9	284.275,8
H	Transportasi dan Pergudangan	28.063,3	32.192,2	35.140,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.698,5	1.893,7	2.052,0
J	Informasi dan Komunikasi	13.741,2	15.186,0	16.815,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.687,3	18.896,8	20.531,4
L	Real Estate	1.235,7	1.356,4	1.479,0
M,N	Jasa Perusahaan	1.249,8	1.411,8	1.545,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	113.347,9	122.153,9	130.599,9
P	Jasa Pendidikan	40.183,8	44.999,4	48.851,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.583,0	20.569,1	22.716,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.854,7	6.315,6	6.804,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.201.896,7	1.319.055,8	1.438.560,9

Lampiran 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	404.102.5	427.273.3	454.497.6
B	Pertambangan dan Penggalian	476.3	506.8	540.8
C	Industri Pengolahan	46.445.2	47.821.4	48,713.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	863.8	952.2	991.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	131.0	142.4	149.6
F	Konstruksi	70.551.3	77.577.4	85,462.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	175.188.4	187.763.0	202,442.1
H	Transportasi dan Pergudangan	20.126.4	22.397.6	23,852.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.164.8	1.238.8	1,322.1
J	Informasi dan Komunikasi	11.671.0	12.643.7	13,422.4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.969.9	13.238.9	13,670.4
L	Real Estate	1.009.9	1.077.2	1,138.5
M,N	Jasa Perusahaan	1.007.0	1.074.5	1,133.5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	76.935.1	81.481.0	85,394.7
P	Jasa Pendidikan	32.156.1	33.743.8	35,513.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.371.6	14.418.3	15,517.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.777.8	5.073.0	5,435.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		872,948.1	928.423.4	989.197.4

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,4803	47,25771	47,05642
B	Pertambangan dan Penggalian	0,052794	0,05342	0,055026
C	Industri Pengolahan	4,859306	4,637886	4,419106
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,082749	0,09483	0,092121
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01383	0,013965	0,013468
F	Konstruksi	7,973001	8,234122	8,68454
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,43268	19,61986	19,76113
H	Transportasi dan Pergudangan	2,334918	2,440545	2,442762
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,141321	0,143561	0,142643
J	Informasi dan Komunikasi	1,143289	1,151277	1,168907
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,471619	1,432597	1,42722
L	Real Estate	0,102812	0,102827	0,102812
M,N	Jasa Perusahaan	0,103988	0,10703	0,107399
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,430749	9,260709	9,078513
P	Jasa Pendidikan	3,343367	3,411482	3,395847
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,546142	1,559383	1,579096
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,487125	0,478798	0,472996
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (persen)

Kategori	Uraian	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,44	5,73	6.37
B	Pertambangan dan Penggalian	6,02	6,39	6.72
C	Industri Pengolahan	4,00	2,96	1.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39,86	10,23	4.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,37	8,71	4.99
F	Konstruksi	10,36	9,96	10.16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,30	7,18	7.82
H	Transportasi dan Pergudangan	20,76	11,28	6.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,16	6,36	6.72
J	Informasi dan Komunikasi	7,52	8,34	6.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,30	2,07	3.26
L	Real Estate	6,73	6,66	5.70
M,N	Jasa Perusahaan	6,07	6,71	5.49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,12	5,91	4.80
P	Jasa Pendidikan	4,86	4,94	5.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,43	7,83	7.62
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,91	6,18	7.14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.29	6.35	6.55

Lampiran 5. Laju Implisit PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2018 (persen)

Kategori	Uraian	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	141,22	145,89	148,94
B	Pertambangan dan Penggalian	133,21	139,04	146,36
C	Industri Pengolahan	125,75	127,93	130,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	115,13	131,37	133,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	126,86	129,32	129,55
F	Konstruksi	135,83	140,01	146,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	133,32	137,83	140,42
H	Transportasi dan Pergudangan	139,44	143,73	147,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,83	152,86	155,21
J	Informasi dan Komunikasi	117,74	120,11	125,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	136,37	142,74	150,19
L	Real Estate	122,36	125,92	129,91
M,N	Jasa Perusahaan	124,12	131,38	136,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	147,33	149,92	152,94
P	Jasa Pendidikan	124,96	133,36	137,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,97	142,66	146,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	122,54	124,50	125,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		137,68	142,07	145,43

Lampiran 6. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
PAD	31.710,47	4,81
Dana Perimbangan	554.480,28	84,08
Lainnya	73.231,65	11,11
Jumlah	640 506,96	100

Lampiran 7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2018

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	4.879,002	15,38
Retribusi	8.820,903	27,82
Bagi Hasil	-	-
Lain-lain PAD	18.010,570	56,80
Jumlah	31.710,476	100

Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018
(1)	(2)
A Belanja Tidak Langsung	309.413,04
Belanja Pegawai	185.944,63
Belanja Subsidi	-
Belanja Bantuan Keuangan	106.369,97
Belanja Hibah	4.380,48
Belanja Bantuan Sosial	12.355,95
Belanja Tidak Terduga	362,00
B Belanja Langsung	337.874,62
Belanja Pegawai	25.263,70
Belanja Barang & Jasa	137.679,70
Belanja Modal	214.931,21
Jumlah / Total	619.779,78

Lampiran 9. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	76
Februari	46
Maret	73
April	78
Mei	78
Juni	73
Juli	73
Agustus	76
September	68
Oktober	82
November	58
Desember	74

Lampiran 10. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Bulan	Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Turun	Naik	Turun	Naik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	2.745	1.316		
Februari	2.788	1.422	1,56	1,56
Maret	1.828	514	-34,43	-34,43
April	1.448	654	-20,78	-20,78
Mei	3.059	2.456	111,25	111,25
Juni	3.913	2.434	27,91	27,91
Juli	2.682	1.722	-31,45	-31,45
Agustus	2.774	1.898	3,43	3,43
September	2.270	1.652	-91,81	-91,81
Oktober	1.850	1.861	-18,50	-18,50
November	1.066	814	476,21	476,21
Desember	2.219	2.044	108,16	108,16

Lampiran 11. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada
Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Bulan	Jumlah Bagasi (kg)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	9.137	551		
Februari	2.349	372	-74,29	-74,29
Maret	8.593	676	265,81	265,81
April	4.132	1.034	-51,91	-51,91
Mei	2.753	435	-33,37	-33,37
Juni	13.734	423	398,87	398,87
Juli	20.522	1.304	49,42	49,42
Agustus	69.686	854	239,56	239,56
September	5219	475	7389,30	7389,30
Oktober	11959	1540	129,14	129,14
November	2868	470	-76,01	-76,01
Desember	9089	398	216,91	216,91

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Jl. H. Ahmad Syukur, Desa Daruba, Morotai Selatan, Pulau Morotai
Telp. (0923) 2221133, Homepage: <http://morotai.kab.bps.go.id>
Email: bps8207@bps.go.id